



HARIAN

EDISI SELASA, 12 MARET 2024

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY

Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)

download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

@lenteratoday

@lenteratoday

@lenteratoday

BOCORAN 101 HALAMAN NASKAH HAK ANGKET

Ada Kapolda Siap Bersaksi di Mahkamah Konstitusi

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan naskah akademik untuk mengajukan hak angket DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 sudah rampung disusun. Naskah akademik tersebut berjumlah 101 halaman. Hal penting yang dicantumkan yakni soal penyalahgunaan wewenang di bidang anggaran. Ukuran mulai dari pelanggaran undang-undang APBN, pelanggaran undang-undang keuangan negara dan pelanggaran tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme. Ada juga dugaan penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos saat pemilu. PDIP dan PKB tampaknya harus berjuang keras untuk mengegolkan hak angket ini. Pasalnya PPP dan NasDem makin tak lantang menyerukannya. Bahkan ada isu tawaran kursi menteri, untuk meredam langkah penolakan terhadap hasil Pemilu 2024 karena banyaknya dugaan pelanggaran. Di sisi lain, dukungan dari luar lingkaran politik pun terus mengalir. Terbaru, sebanyak 50 tokoh masyarakat mulai dari aktivis antikorupsi hingga mantan pegawai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyurati para pimpinan partai politik untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Baca di hal 11...



**Politica (Hal.3)
Pasal Kontroversial
RUU DKJ Bakal
Dibahas DPR-
Pemerintah Besar**

ISI LENGKAP SURAT 50 TOKOH ANTIKORUPSI KE KETUA PARNPOL DESAK HAK ANGKET KECURANGAN PEMILU:

"Perkenalkan, Kami merupakan Tokoh Masyarakat dari berbagai daerah yang memiliki concern terhadap kondisi hukum dan demokrasi Indonesia saat ini. Pada 14 Februari 2024 yang lalu, Indonesia telah melaksanakan hajatan pemilihan umum (pemilu) untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota, dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Pelaksanaan Pemilu tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini.

Ada berbagai peristiwa dan fakta yang mengonfirmasi proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 di atas. Pada sebagiannya, ada kecurigaan yang makin meluas dan memvalidasi suatu indikasi yang sangat kuat, berupa: terjadinya praktik-praktik kecurangan pemilu. Di dalam pemantauan Kami, dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu yang dipersalahkan oleh Masyarakat, terjadi bukan hanya pada saat hari pencoblosan 14 Februari 2024, tetapi juga sejak awal proses penyelenggaraan pemilu hingga pasca pelaksanaan proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparatur kekuasaan lainnya.

Peristiwa di atas tidak hanya menyakitkan hati nurani rakyat tetapi juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di Masyarakat. Ada banyak diskusi dengan berbagai ekspresi di kalangan Masyarakat maupun di media sosial serta muncul dan meluasnya, pernyataan sikap dari guru besar dan dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kini, ekspresi itu sudah bermetamorfosa menjadi berbagai bentuk aksi demonstrasi berupa TOLAK KECURANGAN PEMILU. Antusiasnya rakyat untuk memilih dan menyambut pemimpin baru (presiden dan wakil presiden) serta anggota dewan seolah menjadi runtuh, ambruk dan roboh karena dugaan kecurangan makin sempurna hingga menimbulkan masifitas kecurigaan di sebagian besar tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Jika dilakukan pembaruan atas fakta kecurangan di atas, hal itu akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan serta demokrasi makin terjungkal dan menjadi terperosok hingga tidak lagi dari, untuk dan oleh rakyat. Sementara itu, pelaku kecurangan pemilu terus bersimaharajalela dan menjadi kian bengis, tak lagi sekedar menghidupkan preseden busuk dan bejat di dalam suatu proses pemilu. Kesemuanya itu meningkatkan keburukan kekuasaan karena berpijak pada sifat durjana serta sekaligus mendekonstruksi dan mendelegitimasi kehormatan presiden selaku pemimpin negara maupun anggota dewan selaku wakil rakyat.

Akibat lebih lanjutnya akan berdampak pada hadinyanya ketidapatuhan masyarakat pada pimpinan kekuasaan dan berbagai kebijakan negara yang dihasilkannya. Itu sebabnya, tidak ada pilihan lain, Kami menilai bahwa kita harus menyelamatkan hukum, penegakan hukum serta demokrasi dan demokratisasi di Indonesia melalui pemilu jujur, adil dan bersih dari praktik kecurangan.

Partai politik di dalam sistem demokrasi adalah roh dan sekaligus marwah dari demokrasi itu sendiri. Itu sebabnya, partai politik dinisycayakan sebagai media dan wadah atau kendaraan dari dan untuk menjadi anggota DPR karena hanya anggota partai politiklah yang dapat menjadi anggota DPR. Hal diatur secara jelas di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU M3). Itu artinya, partai politik memiliki kekuasaan terhadap para politisi yang menjadi anggota DPR.

Anggota DPR menurut Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pasal 79 ayat (1) huruf b jo. Ayat (3) UU M3, DPR seperti di atas, memiliki fungsi untuk melakukan Hak Angket guna melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pelaksanaan pemilu, hak penyelidikan ditujukan pada pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR selaku wakil rakyat pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Hak di atas merupakan sesuatu yang penting, strategis, dan berdampak pada kehidupan masyarakat luas dalam konteks bernegara karena rangkaian orkestrasi kecurangan terhadap proses dan tahapan pemilu merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan UU Pemilu dan tidak dapat ditentang, dibenarkan dan dibiarkan.

Fakta orkestrasi dugaan kecurangan pemilu yang begitu kasat mata, vulgar dan ketara sangat jelas telah menghadirkan keresahan di seantero labirin masyarakat dan juga dapat menimbulkan histeria yang potensial memicu terjadinya huru-hara dan kekacauan di dalam sistem sosial kemasyarakatan.

Oleh karena itu, Partai Politik sebagai institusi yang mengorganisasikan wakil rakyat sudah seharusnya menggerakkan dan mendorong DPR untuk menggunakan Hak Angket guna melakukan penyelidikan fakta masifitas kecurangan pemilu. Kesemuanya itu ditujukan untuk menyelamatkan hasil pemilihan umum 2024 dan sekaligus untuk merespons keresahan yang sudah menuju pada kesangsiannya masyarakat serta untuk mencegah terjadinya berbagai kerusuhan, huru-hara dan pembangkangan pada institusi kekuasaan di kalangan masyarakat.

Para partai politik memiliki peran penting untuk mengkonsolidasi, mengaktivasi penergerakan dan menggerakkan fraksi-fraksi anggota DPR untuk mengajukan dan melakukan Hak Angket penyelenggaraan Pemilu 2024. Kami sangat meyakini dan mempunyai harapan yang sangat besar, para partai politik akan menyelamatkan bangsa ini sehingga dengan sengaja terlibat intensif untuk menjaga hukum, penegakan hukum dan demokrasi serta demokratisasi di Indonesia dengan menyelamatkan Pemilu 2024."

JADWAL IMSAKIYAH RAMADAN 1445 H/2024 KOTA SURABAYA

TANGGAL	11 Mar 2024	12 Mar 2024	13 Mar 2024	14 Mar 2024	15 Mar 2024	16 Mar 2024	17 Mar 2024
IMSAK	04:09	04:09	04:09	04:09	04:09	04:09	04:09
SUBUH	04:19	04:19	04:19	04:19	04:19	04:19	04:19
TERBIT	05:31	05:31	05:31	05:30	05:31	05:31	05:30
DUHA	05:58	05:58	05:58	05:58	05:58	05:57	05:57
ZUHUR	11:42	11:42	11:42	11:41	11:41	11:41	11:41
ASAR	14:49	14:50	14:50	14:50	14:50	14:51	14:51
MAGHRIB	17:47	17:46	17:46	17:45	17:45	17:44	17:44
ISYAH	18:56	18:55	18:55	18:54	18:55	18:53	18:53



Sinyal PPN Naik Jadi 12% di 2025 Disebut Jadi 'Pil Pahit' saat Harga Pangan Mahal



(Ilustrasi) Pekerja membawa hasil produk kerupuk putih yang siap dikeringkan di Depok, Jawa Barat. (dok)

JAKARTA-Pemerintah memberi sinyal tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen di 2025. Tarif PPN saat ini sebesar 11 persen baru berlaku sejak April 2022. Kritikan pun mencuat salah satunya dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menyebut sebagai 'pil pahit' bagi masyarakat. Pasalnya saat ini konsumen sedang bergelut dengan mahalnya kebutuhan pokok.

"Ini tentu akan mempengaruhi daya beli konsumen, jika diterapkan pada seluruh komoditas. Konsumen dipaksa menelan pil pahit dengan kondisi ini," tegas Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno, Senin (11/3/2024). Rencana ini akan berdampak langsung pada kenaikan produk dan jasa di hilir, dan dibebankan pada konsumen dalam bentuk kenaikan harga.

Kenaikan PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam aturan tersebut, tarif PPN bisa naik dari semula 11 persen menjadi 12 persen sebelum 1 Januari tahun 2025.

Meskipun kenaikan PPN ini baru akan dilakukan di awal tahun 2025, kata Agus, informasi yang telah beredar memengaruhi psikologis konsumen yang tengah menghadapi kenaikan harga bahan pokok, termasuk beras.

Berdasarkan UU HPP, kenaikan tarif PPN dilakukan secara berkala. Kenaikan tarif PPN terakhir terjadi di

tahun 2022, yaitu dari 10 persen menjadi 11 persen. "Tentu berpotensi membuat psikologis pasar terguncang. Penyampaian informasi membutuhkan komunikasi publik yang baik dengan melihat timing yang tepat," pungkas Agus.

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pun ikut mengomentari keputusan pemerintah yang akan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025. Komentar itu Hotman sampaikan dalam akun instagram @hotmanparisofficial. Menurutnya, keputusan itu akan semakin membuat harga-harga barang dan jasa naik dan membebani masyarakat.

"Pajak naik lagi! Hai kau kau: jangan bilang rasain Hotman! Sebab pajak naik maka harga produk dan jasa naik dan akhirnya rakyat yang bayar! Pelajaran bagi yang tidak sadar," tulis Hotman, dikutip Senin (11/3/2024).

Tergantung Menkeu yang Dipilih

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan kewajiban pemerintah yakni mengelola dampaknya terhadap inflasi dan sosial ekonomi masyarakat bawah, mengingat PPN adalah pajak yang regresif.

"Dampak terhadap inflasi akan tidak besar, mengingat banyaknya fasilitas PPN bagi objek tertentu dan ambang batas PKP yang masih tinggi, tapi kita perlu waspada. Hasil estimasi

dahulu kisarannya akan berkontribusi 0,4 persen," jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Fajry, perlu koordinasi yang baik antara Menteri Keuangan (Menkeu), Bank Indonesia (BI), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Pemerintah Daerah untuk menstabilkan harga. "Sosok pemimpin menjadi penting dalam menentukan efektivitas kebijakan. Untuk itu tak boleh salah pilih Menkeu baru," tegas Fajry.

Meskipun akan meningkatkan laju inflasi, kebijakan ini dinilai berdampak positif pada kenaikan penerimaan negara, berkaca dari kenaikan tarif PPN sebesar 1 persen di tahun 2022. "Ditambah adanya kenaikan akibat inflasi, jadi dampaknya akan menghasilkan penerimaan lebih dari Rp 60 triliun," ungkapny.

Meskipun potensinya sebesar itu, kata Fajry, tidak akan banyak berdampak pada rasio pajak, namun tetap memberikan sumber penerimaan baru bagi pemerintahan selanjutnya.

Selain itu, dia menilai pemerintah perlu mengelola dampaknya terhadap kelompok menengah bawah. Hal ini mengingat PPN adalah pungutan yang regresif, sehingga ada potensi dampak sosial bagi masyarakat bawah.

"Untuk itu pemerintah bisa berikan bantuan sosial sebagai bantalan sosial bagi masyarakat bawah," tuturnya.

Adapun kenaikan PPN secara berkala tidak hanya di Indonesia. Fajry menyebutkan, Singapura juga baru

menaikkan tarif Goods and Services Tax (GST) di 2024. Sebelumnya naik dari 7 persen ke 8 persen di 2023, menjadi 9 persen di 2024.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12 persen tahun depan. Airlangga tak menjawab spesifik PPN akan naik, tapi dia memberi kisi-kisi, pemerintah selanjutnya akan melanjutkan program pemerintah saat ini, termasuk regulasi yang disahkan di periode Jokowi.

"Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan bahwa pilihannya keberlanjutan. Kalau keberlanjutan tentu berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan tetap dilanjutkan. Termasuk kebijakan PPN," kata Airlangga di kantornya, Jumat (8/3/2024).

Airlangga bilang, pembahasan lebih detail APBN 2025 akan dilakukan setelah keluar hasil resmi Pilpres oleh KPU nanti. Sejauh ini, Prabowo-Gibran menjadi yang tertinggi, mengungguli dua calon lainnya.

Dalam pembahasan APBN 2025 itu, akan mencakup hal-hal detail program pemerintah selanjutnya. (wid,bis, ktn,ist/dya)

PROYEKSI POSTUR MAKRO FISKAL PADA TAHUN 2025:

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya 11 persen dan sudah berlaku pada 1 April 2022, kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025

Pendapatan Negara
RP 12,08 (12,77%)
Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Belanja Negara
RP 14,21 (15,22%)
Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Keseimbangan Primer
RP 0,07 (-0,40%)
Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Defisit
RP 2,13 (2,45%)
Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)



Pasal Kontroversial RUU DKJ Bakal Dibahas DPR-Pemerintah Besok

JAKARTA-Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menggelar rapat panitia kerja (panja) bersama pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) pada Rabu (13/3/2024) besok. Pada rapat juga akan mendengarkan pandangan fraksi soal pasal-pasal yang kontroversial.

"Nah jadi kita dengarlah kembali bagaimana pandangan interaksi-fraksi terhadap apakah gubernur daerah kekhususan Jakarta itu dipilih atau ditunjuk itu berarti," kata anggota Baleg DPR, Guspari Gaus, Senin (11/3/2024).

Guspari mengatakan saat ini RUU DKJ masih sebatas rancangan dan berpeluang dapat diubah. Ia juga menilai hal wajar jika ada muatan yang menuai kritik. Salah satunya Pasal 10 ayat (2) draf RUU tersebut. Muatan pada pasal itu yakni RUU gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk hingga diberhentikan presiden dengan memperhatikan usulan DPRD.

"Artinya kalau memang ada kesepakatan dan kesepahaman bahwa gubernur itu dipilih oleh rakyat sebagaimana lazimnya pelaksanaan pesta demokrasi dimana-mana ya, apalagi pemerintah juga tidak setuju ditunjuk, paling yang krusial soal (pasal) itu," ucap Guspari.

Anggota Komisi II DPR itu juga meyakini akan terjadi dinamika saat pembahasan. Khususnya ketika mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi. "Sekarang ini kan kita kan berhadapan dan (pembahasan dari) nol kilometer, berarti kan belum ada, karena belum dibahas tentu kita belum mendapatkan dinamika dari fraksi yang ada di DPR bersama pemerintah," ucap Guspari.

Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta pembahasan pasal-pasal kontroversi di RUU DKJ dibuka ke publik. Termasuk mengenai polemik pemilihan gubernur Jakarta yang dilakukan oleh presiden. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 10 ayat (2) RUU DKJ. "Kita akan perjuangkan DKJ ada pilkada," ujar Mardani, Senin (11/3/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa RUU DKJ segera dibahas DPR dan pemerintah. Pemerintah disebut sudah mengirimkan surat kepada DPR dan menugaskan kementerian terkait untuk membahasnya.

"Dengan ini disampaikan bahwa pemerintah menugaskan menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri perencanaan pembangunan nasional, dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, serta menkomhamb baik bersama sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU dalam usul inisiatif Baleg DPR RI," ujar Dasco di



(Ilustrasi) Tugu Selamat Datang di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat salah satu ikon DKI Jakarta yang direncanakan berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). (dok.afp)

Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Dia mengakui poin mengenai gubernur Jakarta telah diubah dari draf sebelumnya. Ia bilang, penunjukan gubernur tetap dipilih rakyat melalui pilkada. "Gubernur Jakarta) Tetap dipilih oleh rakyat," ujar Dasco.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, Jakarta masih tetap sebagai ibu kota negara sampai diterbitkannya keputusan presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. Hal ini berdasarkan pasal 39 UU IKN.

Seperti diketahui, pembahasan RUU DKJ akan dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama perwakilan pemerintah.

Presiden telah menunjuk lima menteri untuk membahas RUU DKJ antara lain, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM.

Salah satu pengaturan dalam draf RUU DKJ sebelumnya adalah soal pemilihan gubernur/wakil gubernur. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur. Lalu, pada ayat (2) menyebut, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

Pengaruh Proses Transfer ASN

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) harus bisa disahkan menjadi UU dalam Masa Sidang IV DPR. "RUU DKJ harus (selesai diundangkan pada masa sidang ini) karena tidak boleh ditunda lagi," kata Doli.

Jika hal ini ditunda, kata dia, maka akan berdampak pada rencana pemerintah untuk mengirimkan atau melakukan proses transfer pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan akan dimulai pada Juni 2024.

"Transfer kerja-kerja pemerintahan dari Jakarta ke IKN itu sudah mulai tahun ini, makanya saya kira Jakarta harus dipastikan status hukumnya," tutur dia.

Doli menyebut sejak 15 Februari diterbitkan RUU DKJ, maka secara de jure Indonesia punya dua ibu kota, walaupun secara de facto ibu kota Indonesia, masih di Jakarta.

"Ini proses transisi, kami di Komisi II waktu itu mendorong supaya sebelum 15 Februari, (RUU) itu sudah selesai. Cuma kan itu masalah teknis, terhambat pemilu pilpres dan segala macam, tapi tidak terhambat juga," ujar politikus Partai Golkar ini.

Artinya, tambah Doli, Jakarta masih punya Pj gubernur dan program-programnya jalan, hanya tinggal payung hukumnya saja. "Mudah-mudahan teman-teman Baleg (Badan Legislasi), bisa cepat menyelesaikannya," ucapnya. (wid,rls,ist,ktn/dya)

SEJUMLAH PASAL BERMASALAH DALAM RUU DAERAH KHUSUS JAKARTA

PASAL 10 AYAT (2)

Isi: Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

Keterangan: Terpilihnya gubernur dan wakil gubernur bukan lagi melalui pemilihan kepala daerah.

PASAL 10 AYAT (3)

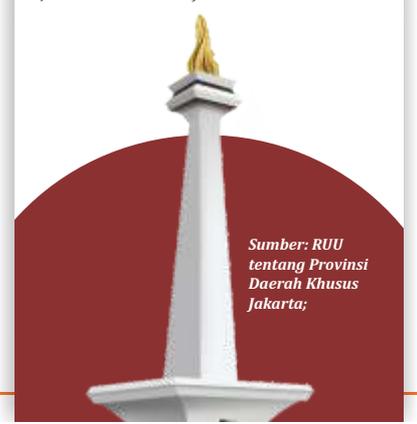
Isi: Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Keterangan: Perpanjangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan putusan presiden atas usulan DPRD.

PASAL 51 AYAT (2)

Isi: Kawasan aglomerasi mencakup wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Keterangan: Ada kemungkinan tumpang tindih kepentingan dan aturan antardaerah (Provinsi Jawa Barat dan Banten).



Sumber: RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

Pilkada Surabaya 2024: Golkar Bakal Inisiasi untuk Usung Eri Cahyadi

SURABAYA – Sesuai jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 akan diselenggarakan serentak 27 November 2024, termasuk Kota Surabaya.

Menanggapi dekatnya momentum Pilkada 2024, Partai Golongan Karya (Golkar) Surabaya semakin mantap untuk mengusung Eri Cahyadi bertarung kembali dalam Pilkada Kota Surabaya.

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni menyatakan bahwa Golkar memiliki keinginan besar dan kuat untuk membangun koalisi antar partai politik (parpol) demi mengusung Eri Cahyadi.

“Kemauan Golkar ini didasari atas keinginan masyarakat agar parpol bisa saling gotong royong untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di Surabaya,” ujarnya, Senin (11/03/2024).

Arif menambahkan, bahwa bentuk gotong royong antar parpol ini dapat diwujudkan dengan terciptanya kerangka kerjasama besar untuk

sama-sama mengusung kembali Eri Cahyadi.

“Masyarakat ingin program pembangunan Surabaya terus berlanjut dan tidak terkendala, itu sebabnya Golkar sangat serius dari awal untuk mengusung Mas Eri maju kembali dalam Pilkada,” jelasnya.

Sementara itu, pria yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya sangat optimis PDI Perjuangan sebagai partai induk Eri Cahyadi setuju dengan gagasan Golkar ini.

“Mas Eri adalah politisi dan kader yang lahir dari rahim PDI Perjuangan, saya rasa sebagai induk, PDI Perjuangan akan senang dan menerima baik bahwa kadernya dihargai dan diapresiasi oleh parpol lain,” bebarnya.

Arif menjelaskan untuk saat ini situasi komunikasi antar parpol di Surabaya sangat baik dan harmonis, sehingga besar peluang untuk terciptanya koalisi demi sama-sama membangun Kota Surabaya melalui



Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni (kiri) dan Walikota Surabaya Eri Cahyadi (tengah)

momentum Pilkada nanti.

“Gagasan soal koalisi gotong royong dalam Pilkada nanti sebenarnya sudah ada omongan antar

parpol, sekarang tinggal meyakinkan masing-masing dari DPP Parpol agar bisa sama-sama mengusung Eri Cahyadi dan harapannya bisa terwujud,” pungkasnya. (Pra/abh)

PKS Target 60 Persen Calon yang Diusung Menang di Pilkada Jatim



Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan saat memimpin akorwil PKS Jatim Koordinasi Pasca Pileg Menuju Pilkada 2024, Sabtu (9/3/2024).

SURABAYA – Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jatim menargetkan ada anggota PKS yang menjadi kepala daerah, serta setidaknya 60 persen calon yang diusung bakal menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024 mendatang.

Target tersebut terlontar oleh Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan pada Rakorwil PKS Jatim Koordinasi Pasca Pileg Menuju Pilkada 2024, Sabtu (9/3/2024) lalu. Irwan berharap agar gelaran Pilkada mendatang merupakan momentum bagi partai untuk pecah telur anggota menjadi kepala daerah.

“Targetnya ada anggota yang menjadi kepala daerah dan Minimal 60 persen calon yang diusung menang di Pilkada se-Jatim nantinya,” ujar Irwan.

Untuk itu langkah-langkah strategis dalam memenangkan pilkada akan segera dilakukan oleh semua DPD PKS se-Jatim. Selain itu juga langkah-langkah strategis terkait dengan Pilgub juga akan segera dilakukan oleh DPW.

“Pasca pileg, DPD PKS se-jatim sudah siap move on melaksanakan agenda berikutnya baik Konsolidasi, optimalisasi capaian pemilu, dan pilkada” pungkang Kang Irwan.

Target tersebut seiring dengan peningkatan perolehan suara PKS di Jatim pada Pemilu 2024 yang meningkat cukup signifikan. “Alhamdulillah kursi untuk PKS di Jawa Timur bertambah, baik di DPRD Jatim maupun DPR RI. Total 5 kursi DPR-RI dari Jatim, serta 5 kursi DPRD Jawa Timur,” ucap kang Irwan.

Untuk itu, dia menyatakan rasa syukur atas hasil yang dicapai dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 ini. Selain itu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berjuang bersama PKS yaitu pengurus, anggota, dan para caleg serta mitra strategis dari berbagai kalangan. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih PKS pada pemilu 2024.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pada tahun 2019, PKS hanya mendapat 2 kursi dari Jatim untuk DPR-RI, di Pemilu 2024 ini bertambah 3 kursi menjadi 5 kursi. Demikian juga di DPRD Jatim, bila pada 2019 kursi PKS hanya 4 sehingga masuk Fraksi Gabungan, sekarang bertambah 1 kursi lagi menjadi 5. Kembali menjadi 1 Fraksi Mandiri. “Insya Allah di DPRD Jatim bisa satu Fraksi PKS,” ujar kang Irwan.

Perolehan suara PKS juga mengalami kenaikan baik di untuk perolehan pusat maupun perolehan propinsi. Bila pada tahun 2019 perolehan suara untuk DPR-RI sebanyak 862.840 suara, sekarang menjadi 1.129.863 suara. Total ada kenaikan 267.023 suara.

Untuk perolehan suara propinsi juga mengalami kenaikan sebanyak 312.270 suara. Bila pada Pileg 2019 untuk DPRD Jatim ada 995.390 suara, sekarang menjadi 1.307.660 suara.

Selanjutnya untuk rincian perolehan kursi, perolehan kursi PKS DPR-RI dari Dapil Jatim U (Surabaya – Sidoarjo) 1 kursi, Dapil Jatim IV (Jember – Lumajang) 1 kursi, Dapil Jatim V (Kab. Malang – Kota Malang –

Kota Batu) 1 kursi, Dapil Jatim VII (Kab. Ngawi – Kab. Magetan – Kab. Ponorogo – Kab. Trenggalek – Kab. Pacitan) 1 kursi, dan Dapil Jatim VIII (Kab. Mojokerto – Kota Mojokerto – Kab. Jombang – Kab. Nganjuk – Kab. Madiun – Kota Madiun) juga 1 kursi.

Sementara itu untuk perolehan kursi PKS di DPRD Provinsi Jawa Timur, rinciannya Dapil Jatim 1 (Surabaya) 1 kursi, Dapil Jatim 5 (Jember-Lumajang) 1 kursi, Dapil Jatim 6 (Kab. Malang – Kota Malang – Kota Batu) 1 kursi. Lalu Dapil Jatim 9 (Ngawi – Magetan – Trenggalek – Ponorogo – Pacitan) 1 kursi, dan Dapil Jatim 14 (Bangkalan – Sampang – Pamekasan – Sumenep) 1 kursi.

Berdasarkan rekapitulasi suara juga Insya Allah peraih Fraksi PKS tersebar di Kota Surabaya, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Jember, Kota Malang, Kota Batu, Kab. Magetan, Kab. Trenggalek, Kab. Madiun, Kota Madiun, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Sampang dan Kab. Pamekasan. Sedangkan peraih pimpinan DPRD meliputi Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Trenggalek.

Atas berbagai capaian tersebut, Irwan menyampaikan tidak boleh sombong bagi yang terpilih dan tercapai. Juga tidak putus asa bagi yang belum terpilih dan tercapai targetnya. Semuanya adalah ketetapan Allah dan semuanya ada kebaikan. (lut/dya)

Eri Cahyadi Ancam Bakal Tutup RHU Nekat Buka Selama Ramadan

SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan selama pelaksanaan ibadah di Ramadan, tidak boleh ada rekreasi hiburan umum (RHU) yang melanggar ketentuan SE Wali Kota tentang Pelaksanaan Bulan Suci Ramadan.

Bahkan, jika kedapatan melanggar atau nekat buka, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak segan melakukan penyegelan.

“Langsung ditutup koyok biyen-biyen (seperti yang dahulu-dahulu) disegel. Karena ada surat pernyataan dari Satpol PP semua RHU itu harus mentaati ini, jika tidak mentaati ini (SE) maka akan ditutup selama satu bulan, karena ini saling menghormati lah satu sama semua umat beragama,” tegasnya, Senin (11/03/2024).

Di samping itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser mengungkapkan untuk menertibkan RHU, pihaknya rutin melakukan patroli di bulan Ramadan setelah pelaksanaan salat tarawih. Patroli rutin itu akan dilakukan mulai dari ke lokasi-lokasi RHU, ruang terbuka, hingga fasilitas umum.

“Jadi tidak ada yang berbeda, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami juga membuka layanan pengaduan melalui aplikasi Warga Ku untuk masyarakat, layanan ini bisa digunakan ketika masyarakat



Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Dok)

mengetahui ada aktivitas yang menyalahi aturan surat edaran (SE) wali kota,” ungkapnya.

Fikser menjelaskan, dasar dari patroli tersebut bukan hanya inisiatif dari pemkot dan jajaran TNI/Polri saja. Melainkan juga berdasarkan dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama.

“Kita juga sudah punya data, mana-mana saja yang mencoba-coba (melanggar), atau titik yang rawan. Itu kemudian kami coba untuk sisir, mulai selesai salat tarawih sampai pukul dua dini hari,” jelasnya.

Tak hanya itu, selama pengamanan

malam hari atau operasi yustisi, pihaknya juga meminta peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kota Surabaya selama Ramadan.

“Bahkan lintas OPD juga bersama-sama melakukan pengawasan di lapangan. Supaya tidak terkesan pemkot itu berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya bersama jajaran TNI/Polri akan menggelar patroli gabungan selama pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan. Patroli gabungan itu bertujuan untuk memberikan rasa

aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan saat ini dirinya telah berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah (PD) di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Nantinya, para camat dan lurah diminta untuk menyiapkan satgas keamanan di setiap RW.

“Satgas nanti kita kembalikan (bentuk) lagi, karena tidak bisa ya, menjaga kota ini dengan satu atau dua, tiga personil, tidak. Contoh, kalau dulu ada pos kamplang, nah itu kita galakkan seperti itu,” kata Eri, Senin (11/03/2024).

Baca Juga : Destinasi Wisata Romantis Surabaya, Paduan Sungai Kalimas dengan Potensi Wisata Sekitarnya

Tak hanya itu, Eri juga memastikan bahwa Satpol PP Kota Surabaya bersama Tim Respati Polrestabes Surabaya juga bakal lebih menggiatkan lagi patroli selama bulan Ramadan.

“Patroli pasti keliling, karena Respatinya Polrestabes dengan Satpol PP selalu berputar selama Ramadan. Untuk patrolinya digelar saat menjelang waktu sahur,” tuturnya.

Dengan adanya patroli gabungan ini, Eri berharap, pelaksanaan ibadah Ramadan bisa berjalan dengan aman dan tentram. (amn/lut)

Tak Mampu Selesaikan Jembatan Rp 7,4 M di Blitar, Kontraktor Hanya Diputus Kontrak



Kondisi saat ini proyek Jembatan Dawuhan di Kec Kademangan, Kab Blitar bantuan BNPB senilai Rp 7,4 miliar

BLITAR – Pengerjaan proyek pembangunan jembatan di Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp 7,4 miliar amburadul, kontraktor tidak bisa menyelesaikan dan hanya disanksi pemutusan kontrak.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Ivong Berttyanto melalui rilisnya menyampaikan tahun 2023 BPBD Kabupaten Blitar

mendapat dana hibah rekonstruksi dan rehabilitasi (RR) dari pemerintah pusat, dengan masa pemanfaatan selama setahun 26 Desember 2022 – 26 Desember 2023.

“Apabila masa pemanfaatan berakhir, pekerjaan selesai maupun belum selesai sisa dana harus dikembalikan ke pemerintah pusat,” tulis Ivong.

Kontraktor pelaksana proyek ini adalah CV Anindika Pratama dari Banda Aceh, dengan masa pelaksanaan 21 Agustus 2023 sampai 22 Desember 2023. “Dalam perkembangannya Pemkab Blitar mengajukan perpanjangan waktu pemanfaatan ke pusat, disetujui sampai 28 Februari 2024,” ungkapnya.

Karena sampai habis kontrak 22 Desember 2023 pekerjaan belum selesai, CV Anindika Pratama

mengajukan penyelesaian pekerjaan 2 kali yakni 50 hari sampai 10 Februari 2024 dan 11 hari sampai 21 Februari 2024. “Sampai 21 Februari 2024 pekerjaan proyek masih 76,16 %, kemudian pada 22 Februari 2024 dilakukan pemutusan kontrak CV Anindika Pratama,” beber Ivong.

Kini kondisi proyek jembatan yang menjadi penghubung antar desa tersebut mangkrak, kaki jembatan rawan ambrol tergerus arus sungai. Karena sisi samping kanan dan kirinya belum diplengseng, apalagi jika terjadi banjir bandang.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPBD Kabupaten Blitar mendapatkan bantuan dari BNPB proyek RR untuk 2 jembatan di Kabupaten Blitar dengan nilai total Rp 12,6 miliar. Yakni rekonstruksi Jembatan Dawuhan di Kecamatan Kademangan Rp 7,4 miliar, serta rehabilitasi Jembatan Tunjung di Kecamatan Udanawu sekitar Rp 4 miliar sekian.

Bantuan ini sudah masuk ke kas daerah pada Desember 2022, namun baru masuk dalam APBD 2023 pada awal tahun. Entah karena apa, khusus

Jembatan Dawuhan prosesnya lambat, hingga pemenang tender baru diputuskan pada Juli 2023 dan mulai dikerjakan Agustus 2023 lalu. Akibatnya pemenang tender, hanya diberikan waktu 120 hari atau 4 bulan sampai 22 Desember 2023. Untuk mengerjakan jembatan dengan panjang sekitar 35 meter, serta lebar 7 meter.

Tidak hanya molornya pengerjaan, kontraktor penggarap yaitu CV Anindika Pratama dari Banda Aceh ini. Ternyata juga diketahui terkena sanksi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, selama setahun mulai 25 Agustus 2023 – 25 Agustus 2024.

Menanggapi kondisi ini Koordinator LSM Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI) Blitar, Joko Prasetyo mempertanyakan perencanaan, karena sejak awal sudah terindikasi sarat permainan. “Termasuk dalam proses lelang yang diungkap Pak Rahmat Santoso (saat itu Wabup Blitar), ada dugaan fee proyek terkait jual beli jabatan,” kata Joko. (ais/lut)

Kota Batu Waspada, Kasus DBD Kembali Menelan 1 Korban Jiwa



Pelaksanaan Fogging di Kelurahan Temas Kota Batu. (Dok. Kelurahan Temas)

BATU - Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Batu kembali menelan 1 korban jiwa. Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Penanganan Bencana Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu, Susana Indahwati, mengumumkan upaya pencegahan akan diperketat.

Peningkatan kewaspadaan dilakukan dengan pengasapan atau fogging, hingga pengoptimalan aktivitas Pemberantasan Sarang

Nyamuk (PSN) di seluruh desa dan kelurahan.

Susan menyebutkan, hingga 8 Maret 2024, Dinkes Kota Batu telah mencatat sebanyak 85 temuan kasus Demam Dengue (DD), 84 DBD, dan 7 kasus Expanded Dengue Syndrome (EDS). Kecamatan Batu, khususnya Kelurahan Temas, menjadi wilayah dengan jumlah temuan terbanyak yakni 18 kasus DD, 26 DBD, dan 4 EDS. Dari data tersebut, tercatat dua kasus

kematian di trimester awal 2024 ini.

"Kasus kematian pertama di Kelurahan Temas, kemudian yang kedua di Punten. Untuk menindaklanjuti adanya laporan baru di kelurahan Temas, kami telah melakukan penyelidikan epidemiologi di wilayah RT 7 RW 7. Di situ ditemukan bahwa angka bebas jentik (ABJ) hanya mencapai 92,5 persen, di bawah standar minimal 95 persen yang disarankan," ujar Susan, saat dikonfirmasi melalui sambungan selular, Senin (11/3/2024).

Susan mengatakan, berdasarkan pada pedoman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, fogging dapat dilakukan jika ada lebih dari satu penderita DBD di suatu wilayah atau lebih dari 3 orang terduga DBD. Sesuai pedoman tersebut, menurutnya fogging dapat dilakukan dalam rangka pencegahan lebih lanjut, dengan melibatkan seluruh masyarakat.

"Fogging yang pertama dilaksanakan pada 8 Maret 2024 kemarin. Kemudian sesi keduanya dijadwalkan pada Jumat, 15 Maret 2024, mulai pukul 07.30 WIB," tambah Susan.

Dalam konteks pelaksanaan fogging, Susan menekankan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Di antaranya yakni, pentingnya menyampaikan informasi jadwal

kegiatan fogging kepada seluruh masyarakat, terutama kepada warga yang tinggal di wilayah kasus dan hingga radius 200 meter dari wilayah tersebut.

"Sehingga masyarakat bisa bersiap diri, dan bangunan dalam keadaan kosong penghuni. Terutama bagi lansia, ibu hamil, dan balita, agar tidak menghirup partikel-partikel dalam pengasapan tersebut. Selain itu, semua jendela harus dalam keadaan tertutup namun pintu penghubung antar ruangan di dalam rumah dalam keadaan terbuka," jelasnya.

Lebih lanjut, meskipun fogging dianggap sebagai tindakan cepat, namun Susan menghendaki jika metode ini memiliki keterbatasan. Maka, sambungnya, pencegahan secara menyeluruh harus melibatkan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan 3M Plus.

"PSN 3M melibatkan tindakan seperti menguras, menutup, dan mendaur ulang tempat-tempat potensial perkembangbiakan nyamuk, serta langkah-langkah lainnya untuk memutus rantai penyebaran DBD. Keberhasilan PSN 3M dapat diukur dengan angka bebas jentik (ABJ) minimal 95 persen," tukasnya. (Santi/Dya)

Investasi 2023 Capai Rp 2,072 Triliun, Kota Malang Optimistis Tahun Ini Lebih Moncer

MALANG - Dibandingkan tahun 2022, nilai investasi di Kota Malang melonjak hingga 197 persen pada tahun 2023 kemarin. Fakta itu membuat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengaku optimistis pertumbuhan investasi tahun ini makin moncer.

Arif mengatakan, berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang ditutup pada Januari 2024 lalu, investasi di Kota Malang pada tahun 2023 mencapai Rp 2,072 triliun. Menurutnya, capaian ini naik sebesar 197 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022.

"Alhamdulillah untuk investasi di Kota Malang kenaikannya signifikan. Total triwulan satu dua sampai empat atau semester satu dan dua, di Kota Malang tahun 2023 mencapai Rp 2 Triliun 72 Miliar," ujar Arif, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Senin (11/3/2024).

Dari total investasi tersebut, menurut Arif, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mendominasi dengan nilai Rp 1,9 Triliun, sedangkan penanaman modal asing (PMA)

mencapai Rp 172 Miliar. Selain itu, Arif menekankan bahwa ketaatan pelaporan LKPM oleh para pelaku usaha di Kota Malang merupakan indikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, ini pengusaha di Kota Malang sudah mulai tertib melakukan pelaporan LKPM baik triwulan maupun semester. Jadi kenaikannya di Kota Malang sudah signifikan. Ini menandakan bahwa investasi di Kota Malang sudah berjalan setelah Covid-19. Menunjukkan ekonomi berangsur membaik," terang Arif.

Sementara untuk tahun 2024 ini, untuk di Kota Malang dirinya menargetkan juga ada kenaikan pada target nilai investasi. Namun dirinya belum dapat memastikan angka dari target tersebut. Sebab masih menunggu keputusan dari target nilai investasi yang ditetapkan oleh Pemprov Jawa Timur.

"Kalau target otomatis kami target naik. Tapi untuk target investasi sendiri dari Pemprov Jatim belum dipublish ke kita. Kemungkinan ya di bulan Maret ini. Kalau untuk jenis investasi yang diproyeksikan, itu masih akan banyak di bidang kuliner.



Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan. (Santi/Lenteratoday)

Mulai dari restoran atau rumah makan, hotel itu juga akan kami genjot," ungkapnya.

Meskipun belum dapat menetapkan kenaikan target investasi di tahun 2024, Arif menyampaikan bahwa target investasi dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.600 triliun pada tahun 2024 ini, akan memberikan dasar bagi Pemprov Jatim untuk menetapkan targetnya.

Dengan mekanisme ini, menurutnya Kota Malang secara otomatis akan mengikuti target yang ditetapkan oleh Pemprov, mengacu pada arahan dan tujuan nasional. "Nah otomatis di Kota Malang juga akan mengikuti target yang akan ditetapkan oleh Pemprov, dengan melihat acuan target dari Pusat. Saya harapkan investasi di Kota Malang bisa naik lagi," tukas Arif. (Santi/Dya)

PROFIL GLORIA, WISUDAWAN DENGAN IPK TERTINGGI DI PETRA CHRISTIAN UNIVERSITY

MENJADI wisudawan berprestasi dengan IPK nyaris sempurna, tentu impian seluruh mahasiswa. Tak terkecuali bagi sosok Gloria Fangie.

Mahasiswi Tax Accounting PCU ini berhasil menjadi wisudawan dengan IPK Tertinggi dari School of Business and Management dalam Wisuda ke-85 PCU (Petra Christian University). Ia meraih IPK nyaris sempurna yakni 3.98.

Tak hanya itu, gadis 22 tahun ini juga berhasil menjadi wisudawan dengan IPK Tertinggi dari seluruh wisudawan Program Sarjana (S1). Bahkan, ia memperoleh penghargaan sebagai lulusan Aktif Berprestasi.

Gloria bercerita, jika awalnya ia tidak menyangka bisa dinobatkan sebagai wisudawan berprestasi. Namun, semangat serta harapan untuk memberikan yang terbaik membawanya menjadi sosok inspiratif.

"Sebelumnya nggak menyangka sih, tapi tetap ada ekspektasi dan harapan untuk lulus dengan hasil yang terbaik," kata Gloria ketika dihubungi, Jumat (8/03/2024).

Gloria menuturkan, untuk bisa meraih prestasi tersebut ia selalu menanamkan di hatinya untuk melakukan yang terbaik, dan sisanya diserahkan kepada Tuhan.

Selain itu, ia juga kerap melakukan tiga kiat ala dirinya agar tetap produktif. Seperti menetapkan tujuan, memiliki rasa tanggung jawab, dan berusaha melakukan yang terbaik.

"Karena ketika sudah memiliki tujuan yang jelas kita dapat fokus untuk mencapai tujuan tersebut," tuturnya.

Di samping menuntaskan studinya, perempuan kelahiran Surabaya, 13 September 2002 ini juga aktif mengikuti berbagai organisasi di kampus hingga menjadi asisten dosen.

"Ada beberapa kegiatan organisasi yang saya ikuti, seperti menjadi MC, anggota divisi acara, wakil ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Pengembangan diri. Selain itu, saya juga menjadi asisten dosen selama dua semester," ungkapnya.

Terkait cara membagi waktu antara kuliah dan organisasi, ternyata Gloria mempunyai cara tersendiri. Ia biasa menetapkan skala prioritas, lalu membuat to do list serta deadline pengerjaan yang dilakukan.

"Lalu saya juga mengurangi waktu bermain sehingga lebih fokus untuk

menyelesaikan tanggung jawab perkuliahan, dan tidak menunda-nunda pekerjaan," jelasnya.

Terkait tantangan yang ia hadapi selama kuliah, Gloria mengatakan jika tantangan terbesarnya adalah membagi waktu ketika mengikuti organisasi, sekaligus asisten dosen dan menjadi tutor sembari memenuhi kewajiban perkuliahan yang ada.

Hal yang dilakukan untuk mengatasinya adalah menetapkan prioritas sekaligus tetap berusaha melakukan yang terbaik di setiap tanggung jawab yang ada.

"Rasa tanggung jawab akan sangat membantu untuk melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu," ucapnya.

Dengan berbagai kesibukan yang ia jalani, Gloria beruntung karena dapat support dari kedua orang tuanya Tjiwo Sudjoko Wiyono dan Wong Yek Fang.

"Kedua orang tua saya berperan sangat penting dalam perjalanan perkuliahan saya. Mereka berusaha untuk mendukung anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik demi masa depan yang menjanjikan. Mereka selalu memberikan dukungan, support dan semangat untuk anak-anaknya," jelasnya.

Kini, Gloria telah bekerja sebagai Tax Consultant di Artax sesuai ia melaksanakan program magang di sana selama enam bulan pada Juli - Desember 2023 lalu.

"Saya berencana untuk mencari beasiswa dan lanjut ber-kuliah S2. Sembari mempersiapkan diri untuk lanjut kuliah, saya akan mendalami profesi saya sebagai seorang konsultan pajak," tukasnya (Lenteratoday/Amanah Nur Asiah-mg)



GLORIA



IBU HAMIL JANGAN BANYAK MAKAN MANIS SAAT BUKA PUASA



DOKTER spesialis obstetri ginekologi lulusan Universitas Sumatera Utara, Medan, Dr. dr. Binarwan Halim M.Ked (OG) Sp.OG(K)-FER mengatakan ibu hamil yang berpuasa disarankan menghindari makan atau minum terlalu banyak manis saat berbuka untuk menjaga peningkatan berat badan.

"Jangan terlalu banyak manis, terlalu banyak berminyak itu tidak baik, jaga peningkatan berat badan," kata Binarwan dalam diskusi kesehatan mengenai infertilitas di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan peningkatan berat badan pada ibu hamil dikhawatirkan akan terjadi diabetes pada waktu akhir kehamilan atau keracunan kehamilan karena terjadi peningkatan hipertensi.

Kenaikan berat badan yang disarankan dokter kandungan adalah 10 sampai 12 kilogram bagi yang memiliki berat badan normal.

Jika terlalu gemuk saat hamil, kenaikan berat badan yang direkomendasikan sekitar 6-9 kilogram saja, sementara bagi yang memiliki tubuh kurus, boleh naik berat

badan sekitar 15 kilogram ke atas.

Maka itu perlu dikontrol asupan makanan karena bisa berbahaya bagi ibu dan juga janin yang dikandungnya.

Binarwan mengatakan ibu yang sedang hamil jika berpuasa diusahakan mengonsumsi cukup protein karena janin terbentuk dari daging yang butuh protein tinggi untuk pembentukan yang sempurna.

"Harus perhatikan makanan tinggi protein apakah bentuk ikan, susu, telur, tempe, tahu," katanya.

Puasa juga disarankan bagi ibu hamil yang memang memiliki daya tahan tubuh baik dan kuat untuk berpuasa setelah berkonsultasi dengan dokter kandungan. Dehidrasi berat bisa memungkinan terganggunya proses kehamilan, sehingga jika dirasa tidak kuat untuk berpuasa ia menyarankan untuk stop berpuasa.

Mual muntah yang sering dialami saat hamil muda juga seringkali membuat seorang ibu memutuskan tidak berpuasa, karena bisa jadi membahayakan janin dan menyebabkan ibu sakit karena daya tahan

tubuhnya sedang turun.

"Kalau nggak sanggup jangan dipaksa, nanti akan jadi sakit karena dehidrasi berat akan mengganggu kehamilannya, jadi coba dulu sehari dua hari, kalau sampai mengalami demam, flu karena turun daya tahan tubuhnya, stop dulu," kata Binarwan.

Asupan nutrisi

Spesialis kebidanan dan kandungan dr. Zeissa Rectifa Wismayanti, Sp.OG menjelaskan, ibu hamil harus memastikan asupan nutrisi dan gizi seimbang terpenuhi di setiap waktu makan.

Pilih makanan yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, vitamin, dan mineral ketika makan sahur dan berbuka supaya kebutuhan gizi ibu hamil dan janin tercukupi

"Hindari processed food yang banyak mengandung garam dan lemak, serta makanan olahan dari gula sederhana," kata Zeissa dikutip dari keterangan resmi.

Zeissa menjelaskan, kedua jenis

makanan tersebut biasanya mudah diolah untuk tubuh sehingga cepat membuat ibu hamil kenyang, tetapi di sisi lain juga mudah kembali lapar. Karbohidrat yang disarankan untuk ibu yang mengandung adalah gandum, oat, nasi merah, hingga nasi cokelat.

Minuman yang mengandung kafein tidak disarankan karena memicu buang air kecil, sakit kepala dan jantung berdebar serta mengurangi kadar zat besi yang bisa diserap tubuh.

Bila tidak tahan mengonsumsi kafein, ada batas yang disarankan, yakni tak lebih dari 200 miligram per hari yang setara dengan dua cangkir kopi instan.

Saat buka puasa, disarankan untuk tidak makan dalam satu porsi yang besar sekaligus, melainkan bertahap dalam porsi kecil agar perut tidak terasa begah.

Makanlah sedikit saat berbuka puasa, kemudian lanjutkan lagi setelah selesai shalat isya atau tarawih untuk mengembalikan energi. (Antara)



"Jangan terlalu banyak manis, terlalu banyak berminyak itu tidak baik, jaga peningkatan berat badan,"

Dr. dr. Binarwan Halim M.Ked (OG) Sp.OG(K)-FER

UNI EROPA MINTA KEJELASAN APPLE USAI BLOKIR EPIC GAMES DARI APP STORE

OTORITAS Uni Eropa mengatakan mereka ingin mengajukan pertanyaan kepada Apple terkait pemblokiran Epic Games untuk membuat toko aplikasi sendiri.

Ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan digital yang baru berlaku di 27 negara anggota pada hari Kamis (7/3/2024).

Pertikaian baru dalam persaingan bisnis antara kedua perusahaan ini membuat Epic, pembuat game Fortnite yang terkenal, telah berjuang keras selama bertahun-tahun untuk melawan kendali besar Apple terhadap distribusi aplikasi iPhone.

Epic menegaskan pada hari Rabu (6/3/2024) bahwa Apple menggagalkan upayanya untuk membuat pasar aplikasi iOS sendiri untuk bersaing dengan App Store milik Apple.

Epic menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Digital Uni Eropa (DMA) yang baru.

Aturan baru yang dirancang untuk membatasi dominasi Apple memaksa mereka mengizinkan pengguna Eropa mengunduh aplikasi iPhone dari toko aplikasi lain. Padahal ini merupakan langkah yang selama ini ditentang oleh perusahaan Apple.

Komis pengawas antimonopoli utama Uni Eropa, mengatakan dalam wawancara pada hari Kamis (7/3/2024) mereka telah "meminta penjelasan lebih lanjut kepada Apple di bawah DMA."

Aturan tersebut mengancam hukuman yang bisa mencapai miliaran kepada pelanggar.

Apple telah dijatuhi denda antimonopoli Uni Eropa sebesar 2



miliar dolar AS karena menggagalkan kompetisi streaming musik.

Komis tersebut menyatakan bahwa mereka juga sedang mengevaluasi apakah tindakan Apple memunculkan keraguan terkait kepatuhan perusahaan tersebut terhadap peraturan Uni Eropa lainnya.

Evaluasi ini termasuk Digital Services Act yang melarang perusahaan teknologi menerapkan syarat dan ketentuan mereka secara sewenang-wenang.

Epic berpendapat bahwa Apple secara berani melanggar DMA dengan menolak toko aplikasi iPhone alternatif yang rencananya akan didirikan di Swedia untuk melayani pengguna Uni Eropa.

Epic menuduh Apple membalas kritik pedas yang dilontarkan oleh CEO

Tim Sweeney. Sweeney memelopori kasus antimonopoli yang sebagian besar tidak berhasil melawan iPhone App Store di AS.

Apple mengatakan bahwa tindakan mereka wajar karena kasuk melanggar hukum sebelumnya telah dilakukan oleh Epic di pengadilan AS tahun 2021.

Apple memblokir Epic dari App Store setelah mencoba mengatasi pembatasan yang menurut Apple melindungi keamanan dan privasi pengguna iPhone.

Tindakan ini juga membantu Apple untuk mengembalikan sebagian investasi mereka dalam perangkat populer tersebut.

Apple menyatakan bahwa pelanggaran kontrak serius dari Epic memungkinkan mereka mengakhiri

hubungan dengan semua cabang perusahaan, afiliasi, dan mitra lain yang sepenuhnya dimiliki Epic Games.

Keputusan ini diambil oleh Apple mengingatkan Epic agar tidak mengulangi tindakan yang terjadi di masa lalu dan saat ini.

Dalam postingan baru-baru ini di blog resmi Epic Games, Epic Games berpendapat bahwa tindakan Apple adalah "pelanggaran serius terhadap DMA" yang "menunjukkan Apple tidak berniat membiarkan persaingan sesungguhnya di perangkat-perangkat iOS."

Postingan itu memberikan beberapa informasi tentang kemungkinan alasan mengapa Apple melakukan dugaan tindakan tersebut, termasuk sebagai tindakan pembalasan atas postingan X di mana pendiri dan CEO Epic Games Tim Sweeney mengkritik praktik Apple.

Epic Games juga mengatakan bahwa Apple mungkin telah menghentikan akun tersebut setelah mengangap Epic Games Store sebagai ancaman ekosistemnya.

Postingan tersebut kemudian berlanjut dengan membagikan apa yang tampaknya merupakan korespondensi email antara Epic Games dan perwakilan Apple.

Dalam satu email, perwakilan Apple secara langsung mengutip postingan Sweeney dan mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Epic Games akan gagal "mematuhi komitmen-komitmen kontraknya" dan menggunakan akun tersebut sebagai "sarana untuk memanipulasi proses di yurisdiksi-yurisdiksi lain" sebagai alasan penghentian akun (The Associated Press/Penerjemah: Yuda-mk)





TIPS AMAN BEROLAHRAGA PADA BULAN PUASA

PRAKTIKSI Kesehatan Masyarakat, dr. Ngabila Salama, MKM membagikan tips aman dan sehat berolahraga pada saat menjalani puasa di bulan Ramadhan.

Ngabila mengatakan, seseorang yang menjalani puasa disarankan untuk tetap beraktivitas fisik atau berolahraga ringan agar tubuh tetap bugar.

"Olahraga sebaiknya tidak yang terlalu berkeringat. Yang penting kita berkeringat tipis-tipis aja, jangan sampai baju olahraga kita penuh keringat sampai basah begitu," kata Ngabila dalam webinar "Tips Puasa ala CERDIK" oleh Kementerian Kesehatan, di Jakarta.

Ia menjelaskan, seseorang yang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan selama satu bulan penuh akan mengalami perubahan metabolisme dalam tubuhnya lantaran waktu makan, minum, hingga istirahat yang berubah.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat agar menjaga aktivitas fisik secara terkontrol sehingga ibadah puasa tidak terganggu.

Menurut dia, seseorang dapat berolahraga berdurasi sekitar 20 hingga 30 menit, dengan intensitas rendah, dan disarankan untuk dilakukan di dalam ruangan.

Adapun waktu terbaik untuk beraktivitas fisik secara ringan dimulai sejak sebelum matahari terbit hingga menjelang tengah hari untuk menghindari dehidrasi.

"Olahraga ringan saja untuk menghindari dehidrasi karena keluar keringat terlalu berlebihan. Yang penting kita dapat efek hormon endorfin itu, efek menyenangkan dari berolahraga," ujarnya.

Lebih lanjut Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) itu menyampaikan bahwa seseorang yang akan mulai berolahraga, disarankan pada waktu setelah berbuka puasa.

Hal tersebut dikarenakan energi telah terisi kembali (recharge) oleh makanan dan minuman saat berbuka puasa sehingga relatif aman untuk melakukan olahraga dengan tingkat sedang.

Beberapa jenis olahraga yang disarankan dilakukan pada saat berpuasa adalah berjalan cepat atau sepeda statis dalam ruangan dengan level sedang.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak memaksakan diri untuk berolahraga berat, khususnya bagi seseorang yang tetap bekerja pada saat menjalani puasa.

"Aktivitas fisik juga tidak selalu berolahraga, yang penting itu bergerak. Bisa seperti peregangan (stretching) di sela-sela pekerjaan atau berjalan kaki sekitar 6000 langkah hingga 8000 langkah," katanya.

TIPS OLAHRAGA SELAMA PUASA YANG PERLU DICOBA

Terdapat beberapa tips yang perlu

kamu coba agar berolahraga selama puasa aman, sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi tubuh.

1. Periksa Kondisi Terlebih Dahulu

Meski penting untuk dilakukan, berolahraga selama berpuasa juga dapat menurunkan tingkat kekebalan tubuh. Oleh sebab itu, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum benar-benar berolahraga saat puasa.

2. Pilihlah Waktu Olahraga yang Tepat

Untuk beberapa orang, olahraga menjelang sahur adalah waktu yang ideal karena di masa itu sedang segar-segarinya, dan setelah latihan bisa mengisi perut dengan makanan saat sahur. Efeknya tubuh terasa lebih fit, nafsu makan juga lebih baik ketimbang tidak olahraga sama sekali.

Waktu olahraga yang juga dapat dilakukan di bulan Ramadhan adalah setelah berbuka puasa. Namun, jika memilih untuk berolahraga di waktu tersebut, usahakan untuk mengatur waktumu dengan baik, ya. Hindari berolahraga 1-2 jam sebelum tidur agar hormon adrenalin turun, sehingga kualitas tidur terjaga dengan baik.

3. Pilihlah Jenis Olahraga yang Tepat

Beberapa jenis olahraga yang bisa

menjadi pilihan adalah lari, yoga, futsal, angkat beban, dan aerobik. Sekadar jalan pagi atau sore hari juga bisa menjadi pilihan olahraga selama puasa yang ringan ketimbang tidak melakukan olahraga sama sekali.

Penting bagi orang-orang yang tetap berolahraga selama puasa untuk selalu membaca sinyal tubuh. Sebagai sebuah kesatuan sistem, tubuh bisa mengirimkan sinyal sebagai tanda agar kamu lebih sadar terhadap kondisi tubuh (Antara/halodoc)



"Olahraga sebaiknya tidak yang terlalu berkeringat. Yang penting kita berkeringat tipis-tipis aja, jangan sampai baju olahraga kita penuh keringat sampai basah begitu,"

**dr. NGABILA
SALAMA**

Praktisi Kesehatan Masyarakat

Bocoran 101 Halaman ... (dari Hal 1)

CALON wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengungkap sikap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri perihal pengajuan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Mahfud menyatakan Megawati melihat tak perlu sosok ujung tombak untuk menggulirkan hak angket maupun permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Gerakan mengajukan ke langkah konstitusi sebagai langkah hukum dan angket itu bisa diteruskan. Tidak harus terlalu resmi ada pimpinan, itu kan (hak angket) haknya anggota DPR," kata Mahfud di kediaman Butet Kertarejasa, Kasihan, Bantul, DIY, Senin (11/3/2024).

"Bu Mega itu menganggap untuk angket dan hukum itu langsung jalan aja, lurus, tegas. Tapi, itu sebenarnya belum perlu turun tangannya Bu Mega untuk memimpin itu," ujar Mahfud.

Mahfud sendiri hadir di kediaman Butet untuk makan siang bersama calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bareng para seniman dan akademisi.

Dalam kesempatan itu, Mahfud sempat menceritakan momen dirinya bersama Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto duduk dalam satu forum bersama 16 tokoh masyarakat dari kalangan akademisi, aktivis perempuan dan antikorupsi, Jumat (8/3/2024) lalu.

Pada acara kemarin itu pula, Mega mengungkapkan pandangannya mengenai hak angket dan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK tadi. "Nah urusan angket dan hukum ke MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh dan itu bisa dilakukan tanpa harus Bu Mega turun pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis," tutur Mahfud.

Megawati, menurut Mahfud, juga didorong para tokoh masyarakat yang hadir dalam forum kemarin untuk memimpin gerakan merestorasi demokrasi yang mereka anggap telah rusak. Kendati, kata Mahfud, presiden RI ke-5 itu belum menentukan sikapnya atas permintaan itu karena belum waktunya bagi dia untuk memberikan jawabannya.

"Bu Mega itu jauh pikirannya, masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan (presiden-wakil presiden), Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru," pungkasnya.

Di sisi lain, terkait naskah akademik hak angket, dikatakannya turut mencantumkan pula pandangan serta masukan penting darinya. "Sudah, naskah akademisnya itu 101 halaman, bagus saya sudah baca, sudah tertampung semua pendapat saya sehingga saya tidak perlu memberi beban baru," kata Mahfud.

Masukan penting yang Mahfud berikan untuk naskah akademik

tersebut yakni soal penyalahgunaan wewenang di bidang anggaran. "Penyalahgunaan wewenang di bidang anggaran, itu aja, kalau ndak jadi yang jadi ukuran nanti di situ pelanggaran undang-undang APBN, pelanggaran undang-undang keuangan negara dan pelanggaran tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme, kan ada itu Undang-undang Nomor 28," ungkap Mahfud.

Kata Mahfud, masukan dari dia itu mencakup dugaan penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos saat pemilu. "Iya, penyalahgunaan bansos terhadap undang-undang APBN dan undang-undang keuangan negara," pungkas pasangan capres Ganjar Pranowo itu.

Sebelumnya, Mahfud mengaku sudah memegang dan membaca sebagian dari naskah akademik untuk mengajukan hak angket DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan mengusulkan hak angket. Namun, ia enggan mengungkap siapa saja, lantaran hal itu merupakan urusan partai politik.

La meyakini rencana angket ini tidak akan mandek di tahap pengusulan. Prediksinya, perdebatan alot akan terjadi di tahap persetujuan. "Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan, ya. Nanti perdebatannya di tahap persetujuan, apakah mau dilanjutin usul ini, atau tidak. Itu nanti semua partai akan ikut, nah nanti kita lihat di situ," katanya.

Mahfud sebelumnya juga menjelaskan tidak ada kaitan langsung antara hak angket dugaan kecurangan pemilu dengan pemakzulan presiden. Ia berkata yang diselidiki dalam hak angket adalah kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan beberapa undang-undang, bukan pasangan calon maupun KPU.

"Yang digugat adalah kebijakan pemerintah, bukan paslon, bukan KPU, yang dipersoalkan di angket itu, tapi kebijakan pemerintah di dalam pelaksanaan beberapa undang-undang yang berimplikasi, tentu saja, dalam praktiknya terhadap pemilihan umum, tetapi tidak akan menafikan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU dan MK," kata Mahfud.

Tiga anggota DPR dalam paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (5/3), telah mendorong hak angket. Mereka yakni, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP. Mereka menyoroTI dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2024.

Gugatan Pilpres ke MK

Di sisi lain, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Henry

mengungkapkan salah satu saksi yakni seorang kepala kepolisian daerah (kapolda).

Menurutnya, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU. Namun, akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif (TSM).

Oleh karena itu, kata Henry, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan keliru dan tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti.

"Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM," kata Henry dalam keterangannya, Senin (11/3/2024).

Henry menegaskan bahwa bukan hal baru bila MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Sebab hal seperti ini sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar yang persidangan seperti pakar sosiologi massa.

Henry menambahkan, kekalahan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah (Jateng) juga tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Padahal, Ganjar pernah menjabat gubernur di provinsi itu selama 10 tahun, dan Jateng merupakan basis suara PDIP.

Dia meyakini TPN Ganjar-Mahfud bisa membuktikan di MK terjadi mobilisasi kekuasaan mulai dari mengerahkan aparaturnegara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. "Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot," ujarnya.

Henry membenarkan dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jateng, sehingga partisipasi memilih cukup rendah berkisar 30 persen.

Dia menyebut kerusakan Pemilu 2024 sudah didesain dan direncanakan oleh penguasa yang diawali dengan dipaksakannya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.

Gibran maju pada kontestasi politik setelah ada cawe-cawe Jokowi di MK, kemudian berlanjut ke KPU yang menerima pendaftaran paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Padahal ketentuan usia untuk menjadi capres-cawapres kala itu adalah 40 tahun. Sementara, usia Gibran baru 36 tahun. "Di sini terlihat terencana semua, Jokowi melakukan intervensi terhadap hukum dan pelaksana hukum," pungkasnya.

Terkait dugaan iming-iming kursi menteri agar tidak ada hak angket dan gugatan ke MK, Juru bicara Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Imam Priyono membantah dengan tegas. "Tidak benar ada tawaran kursi menteri ke PPP," ujar Imam kepada wartawan, Senin (11/3/2024).

Imam mengatakan, PPP belum memutuskan setuju atau tidak setuju dengan hak angket Pemilu 2024 karena perlu pertimbangan yang matang dan hati-hati terutama manfaatnya bagi masyarakat dan perkembangan demokrasi Indonesia ke depannya. Karena itu, kata dia, pihaknya melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif. (wid,rls,bis,kum,min,ist/dya)

ATURAN HAK ANGKET DPR RI

- Aturan tentang hak angket DPR RI tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 73: "Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan."
- Lebih lanjut tentang pengusulan Hak Angket termuat dalam Pasal 199 UU Nomor 17 Tahun 2014. Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR RI dan lebih dari 1 fraksi kepada pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI dan dibagikan kepada semua anggota.

TIGA HAK ISTIMEWA YANG DIMILIKI DPR RI

Dalam Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014, disebutkan bahwa DPR RI mempunyai tiga macam hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketiga hak DPR RI ini dalam hal untuk menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan.

- **Hak Interpelasi:** Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- **Hak Angket:** Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- **Hak Menyatakan Pendapat:** Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
 - Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
 - Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
 - Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden



IRAN KRITIK BANTUAN AS KE GAZA: PERTUNJUKAN KONYOL DAN PAHIT

Umat Muslim di Gaza melakukan salat tarawih awal Ramadan tahun ini di tengah gelapnya kondisi Kota Rafah karena tidak adanya tenaga listrik akibat serangan Israel. (AP)

TEHERAN - Memasuki bulan Ramadan, ketegangan di Gaza makin meluas. Saat Israel bersikukuh tak akan menghentikan serangan, Iran mengeluarkan kecaman terhadap Amerika Serikat (AS).

Bantuan yang dikirimkan AS ke Gaza disebut Iran sebagai pertunjukan konyol dan pahit. Pasalnya, AS selama ini pemerintahan Joe Biden selalu menghalangi upaya internasional untuk melakukan gencatan senjata di wilayah Palestina yang terkepung.

"Langkah simbolis AS untuk mengirim bantuan kemanusiaan adalah sebuah tindakan yang menggelikan dan sekaligus sebuah pertunjukan yang pahit," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Senin (11/3/2024).

"Di satu sisi, mereka mencegah gencatan senjata dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB, dan di sisi lain, mereka mencoba meningkatkan citra penghasut perang di mata masyarakat dunia dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan dengan cara yang simbolis dan konyol," ujar dia.

Dia merujuk pada veto AS terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata di Gaza, yang dilanda perang pada tiga kesempatan berbeda. Kanaani mengatakan bahwa dunia kini menyadari sepenuhnya peran Amerika dalam menciptakan dan memperpanjang perang Gaza.

Menurutnya, opini publik tidak akan berubah dengan tindakan simbolis tersebut. Dia juga mengancam

komunitas internasional atas tindakan lamban yang menyakitkan dalam mengakhiri perang rezim Israel di Gaza.

"Lebih dari lima bulan setelah serangan brutal Zionis, sayangnya kita menyaksikan tindakan lamban yang sangat menyakitkan dari komunitas internasional, terutama PBB dan Dewan Keamanan yang tugas utamanya adalah memastikan perdamaian dan keamanan internasional," ujar Kanaani.

Diplomat Iran tersebut menyatakan Dewan Keamanan PBB gagal memenuhi tugasnya. Hal itu terjadi setelah dukungan politik dan militer AS terhadap rezim Israel dan penggunaan hak veto.

Netanyahu Tolak Negara Palestina Berdiri

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengabaikan seruan Presiden Amerika Serikat Joe Biden soal rencana menyerang Rafah, Gaza selatan saat Ramadan. Netanyahu merespons pernyataan Biden yang menyebut operasi di Rafah adalah garis merah. Presiden AS juga meminta dia memikirkan ulang dampak tindakan Israel di Gaza.

"Anda tahu, saya punya garis merah. Anda tahu apa garis merahnya? Agar [serangan mendadak] 7 Oktober tak terjadi lagi," kata Netanyahu saat wawancara dengan media Jerman Axel Springer, Minggu (10/3/2024).

Pernyataan Netanyahu merujuk serangan dadakan Hamas ke wilayah Israel yang kemudian dibalas dengan serangan besar-besaran dan deklarasi perang. Netanyahu juga menegaskan

akan tetap mengirim militer ke Rafah, terlepas ada kesepakatan gencatan senjata atau tidak. "Kami akan ke sana. Kami tidak akan meninggalkan [Gaza]," kata Netanyahu.

Pada kesempatan terpisah, Netanyahu juga menegaskan operasi darat di Rafah tak akan berlangsung lebih dari dua bulan. Namun, PM Israel ini tak memberikan rincian lebih lanjut soal waktu pasti operasi di Rafah berakhir.

"Setelah kita memulai aksi intens untuk memberantas batalion teroris Hamas di Rafah, itu hanya dalam hitungan minggu, bahkan berbulan-bulan. Artinya tidak lebih dari dua bulan, mungkin enam minggu, mungkin empat," ujar dia.

Situasi di Jalur Gaza semakin memprihatinkan, dengan separuh dari 2,3 juta jiwa penduduknya berlindung di Rafah untuk menghindari gempuran Israel. Banyak dari mereka yang tinggal di bawah tenda plastik dan menghadapi kekurangan makanan yang parah, suasananya juga dipenuhi kemuraman.

Warga Palestina pun menyambut datangnya bulan suci Ramadan dalam suasana suram. Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (11/3/2024), harapan untuk gencatan senjata, yang memungkinkan Ramadan dijalani dengan penuh kedamaian, tampaknya berujung kekecewaan, dengan perundingan yang berlangsung di Kairo, Mesir, terhambat.

Kesepakatan gencatan senjata ini mencakup jeda pertempuran selama enam pekan dan pembebasan sekitar 100 sandera yang ditawan Hamas.

Hamas menuding Israel sengaja menggagalkan upaya gencatan senjata itu. Israel disebut-sebut tak mengirim delegasi ke Kairo karena berharap menerima semua daftar sandera Hamas yang masih hidup.

Namun, Hamas enggan mengabulkan permintaan itu. Mereka memandang usulan Israel tak mungkin terjadi tanpa gencatan senjata karena sandera tersebar di zona perang.

Israel juga menolak permintaan Hamas yang ingin agresi pasukan Zionis betul-betul berakhir dan menarik seluruh pasukan dari Palestina.

"Kami tidak melakukan persiapan apa pun untuk menyambut Ramadan karena kami telah berpuasa selama lima bulan," tutur salah satu warga Gaza bernama Maha, yang seorang ibu darilima anak.

Saat Ramadan sebelumnya, Maha biasanya memenuhi rumahnya dengan dekorasi dan mengisi kulkasnya dengan pasokan makanan untuk berbuka puasa bersama keluarga. Namun kini, Maha sulit mendapatkan makanan untuk keluarganya.

"Tidak ada makanan, kami hanya punya makanan kaleng dan nasi, sebagian besar makanan dijual dengan harga yang sangat mahal," ujar Maha melalui aplikasi chat dari tempatnya dan keluarganya berlindung di Rafah.

Kementerian Kesehatan Gaza mengungkap update jumlah korban tewas di Gaza, Palestina mencapai 31.045 orang akibat serangan Israel. 72.654 orang lainnya terluka. (Reuters, Al Arabiya, ist/dya)